

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhsin, M.I., Awaluddin, M. and Suprayogi, A. (2016) 'Jurnal Geodesi Undip Oktober 2013 Jurnal Geodesi Undip Oktober 2013', *Jurnal Geodesi Undip*, 5(4), pp. 132–139.
- Budiawan, T. *et al.* (2015) 'Mobile tracking gps ( global positioning system ) melalui media sms ( short message service )', 1(2).
- Damayanti, A.P. and Harintaka, H. (2021) 'Kajian Keandalan True Orthophoto Untuk Pemetaan Skala Besar 1 : 5.000', *Geoid*, 16(2), p. 177. doi:10.12962/j24423998.v16i2.8220.
- Edy Wahyono (2006) 'Penerapan Teori Fungsi untuk Menganalisa Kehidupan Masyarakat', *jurnal seni dan budaya*, 4(2), pp. 1410–9700.
- Hadiwijoyo, S.S. (2011) *Perbatasan negara dalam dimensi hukum internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hermana, M.A. (2015) 'Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan', *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1).
- Hermana, M.A. (2017) 'Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah', *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2), p. 74.
- Mulyanti, D. (2017) 'Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui judicial Review Dan Executive Review', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), p. 134. doi:10.25157/jigj.v5i1.238.
- Patongloan, A.J. (2019) 'Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah', *Jurnal Akta Yudisia*, 4(1), pp. 77–108. doi:10.35334/ay.v4i1.1023.
- Permendagri (2017a) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa', *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa* [Preprint].
- Permendagri (2017b) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah'.
- Pontoh, N.K. and Setiawan, I. (2008) *Pengantar Perencanaan Kota*. Bandung: Penerbit ITB.
- Prabandini, F. (2016) 'Perencanaan Geometrik dan Perkerasan Ruas Jalan Panggul - Desa Sobo Proyek Jalur Lintas Selatan (JLS), Provinsi Jawa Timur', p. 363.
- Pruitt, D.G. dan J.Z.R. (2009) *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rizki, D.Y. (2018) '( Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru ) Conflict Management for the Boundary of Kampar Pekanbaru ( Case Study Sub-District of Bukitraya Pekanbaru )', 5(1), pp. 1–13.
- Rizki, D.Y. and Harahap, T.K. (2018) *Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru)*.
- Setiadi, E.M. dan U.K. (2011) *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2006) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solichin, M. (2017) *Konflik tapal batas antara kabupaten mesuji dan kabupaten tulang bawang*. Universitas Lampung.
- Sulistiyono, D., Nuryadin, D. and Hadi, A. (2014) 'Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)', *Jurnal Bina Praja*, 06(01), pp. 31–40. doi:10.21787/jbp.06.2014.31-40.
- Susan, N. (2009) *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 (1999) 'Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999'.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (2004) *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Dpr*.
- Unfani, L. (2020) 'Konflik Sosial Daerah Tapal Batas Kecamatan Siompu dan Siompu Barat (Studi Kasus di Buton Selatan)', *Konflik Sosial Daerah Tapal Batas Kecamatan Siompu Dan Siompu Barat*, 100, pp. 1–100.
- Wahyono, E.B. and Suhattanto, M.A. (2019) *Survey Satelit Pertanahan, JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*. doi:10.24912/jmts.v2i2.8798.
- Sahyana, Y. (2019) 'Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi', *Jurnal Konstituen*, 1(1), pp. 45-58.